



# PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

SEKRETARIAT DPRD PROVINSI KALIMANTAN UTARA

## RENCANA KERJA

# 2018



RENJA 2018



## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas Rahmat dan Karunia-Nya kami dapat menyelesaikan penyusunan dokumen Rencana Kerja (RENJA) Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017 yang merupakan implementasi dari rencana strategis Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Utara dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Kami menyadari di dalam menyusun Rencana Kerja (RENJA) Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017 ini masih banyak terdapat kekurangan, baik yang berkaitan dengan perumusan program maupun kegiatannya. Namun demikian, besar harapan kami agar Rencana Kerja (RENJA) Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017 ini dapat bermanfaat, khususnya bagi Sekretariat DPRD dan yang memerlukannya.

Tanjung Selor, 9 Agustus 2017

Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Utara

**Drs. Purnomo, MM**  
**NIP. 19590810 198701 1 002**



## DAFTAR ISI

	Halaman
BAB I	PENDAHULUAN..... 1
	1.1. Latar Belakang..... 1
	1.2. Dasar Hukum Penyusunan..... 3
	1.3. Sistematika Dokumen RKPD..... 5
	1.4. Maksud dan Tujuan..... 6
BAB II	EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU ..... 8
	2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah..... 8
	2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah..... 9
	2.3 Isu –isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Utara..... 11
	2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD..... 11
	2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ..... 17
BAB III	TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN..... 18
	3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional..... 18
	3.2. Tujuan dan Sasaran Renja PD..... 18
	3.3 Program dan Kegiatan..... 19
BAB IV	PENUTUP ..... 25



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. LATAR BELAKANG**

Rencana strategis Perangkat Daerah ditetapkan dengan Perkada setelah RPJMD ditetapkan. Rencana strategis Perangkat Daerah dirumuskan ke dalam rancangan rencana kerja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD. Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renja-SKPD, adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang telah disempurnakan dengan berpedoman pada Renstra SKPD Tahun 2016-2021, sebagai dokumen rencana tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Renja Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Utara memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah yang ditetapkan setelah ditetapkannya RKPD.

- a. Renja SKPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari penyempurnaan visi, misi dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
- b. Renja merupakan acuan SKPD untuk memasukan program kegiatan kedalam KUA dan PPA dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD tahun 2018;
- c. Renja SKPD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program/kegiatan Instansi guna mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah pada tahun 2018. Ini merupakan tahun kedua pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis (Renstra Tahun 2016 - 2021);.

Mengingat arti strategis dokumen Renja SKPD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja SKPD



harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah antara lain :

1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan mengacu RKPD tahun berkenaan.
2. Program dalam Renja harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam Misi RPJMD pada tahun berkenaan.
3. Program dan kegiatan dalam Renja SKPD harus selaras dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrenbang.
4. Program dan kegiatan dalam Renja SKPD harus selaras dengan program dan kegiatan Renstra Tahun 2016- 2021.
5. Program dan kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (*outcome*), indikator kinerja keluaran (*output*) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan perkiraan maju.

Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Utara merupakan unsur pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dipimpin oleh seorang Sekretaris DPRD yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Gubernur Provinsi Kalimantan Utara dengan tugas pokok membantu Gubernur dalam menyelenggarakan pengawasan pelaksanaan urusan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.

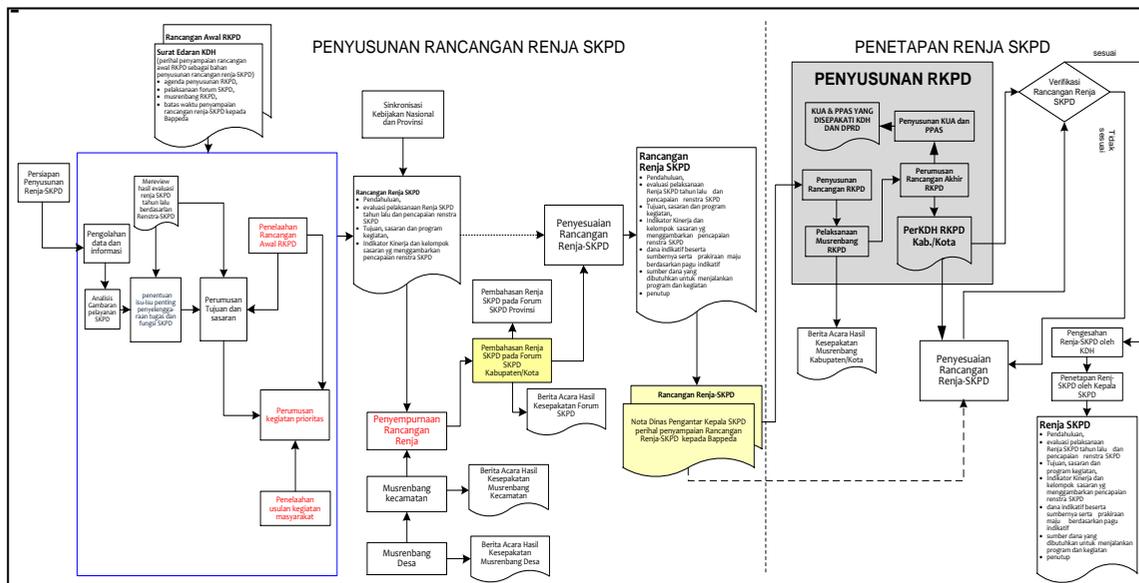
Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Utara dalam melaksanakan tugasnya didasarkan pada Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Utara Nomor: 08 Tahun 2014 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Utara. Tugas pokok dari Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Utara adalah: menyelenggarakan administrasi kesekretariatan DPRD, administrasi keuangan DPRD, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Hal



tersebut dilakukan dalam rangka menciptakan tata kelola Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara yang baik dan pemerintahan yang bersih sesuai dengan visi ” **Menjadi Lembaga Profesional Dalam Memberikan Pelayanan Prima Terhadap Tugas Pokok dan Fungsi DPRD Provinsi Kalimantan Utara**”

Adapun Bagan Alur Tahapan Penyusunan Rencana kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam gambar dibawah.

Gambar.G-VI.A.2  
Bagan Alur Tahapan Penyusunan Renja



### 1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan penyusunan Rencana Kerja ( Renja ) Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Utara tahun 2018 antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara



- Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4484);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
  5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
  6. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);



12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 6 tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 ([Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara tahun 2015 Nomor 01, Nomor Registrasi Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara tahun 2015 Nomor 1](#));
15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kalimantan Utara Tahun 2016-2021.
16. Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Utara Nomor 11 tahun 2016 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara
17. Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Utara Nomor 19 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

### **1.3. MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja ini adalah sebagai tindak lanjut dari Renstra Tahun 2016-2021 dan merupakan panduan dalam mengevaluasi pelaksanaan program / kegiatan Tahun 2017, dan perencanaan program / kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018.

Sedang tujuan disusunnya Rencana Kerja SKPD adalah untuk menyempurnakan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan serta indikator kinerja sesuai dengan Renstra Tahun 2016 - 2021 dalam melaksanakan



program / kegiatan yang ada di Rencana Kerja (Renja) ke dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran (KUA-PPA) Tahun 2018.

## **1.4 SISTEMATIKA PENULISAN**

### **BAB I PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Mengemukakan pengertian ringkas tentang renja SKPD, proses penyusunan Renja SKPD, keterkaitan antara Renja SKPD dengan dokumen RKPD, Renstra SKPD serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD;

#### **1.2. Landasan Hukum**

Memuat tentang peraturan perundangan serta peraturan daerah dan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan serta acuan dalam perencanaan dan penganggaran SKPD;

#### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja SKPD yang merupakan implementasi program kegiatan tahunan dari Renstra SKPD

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Susunan garis besar isi dokumen dan menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja SKPD

### **BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3. Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Utara

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat



### **BAB III TUJUAN, DAN SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja PD
- 3.3 Program dan Kegiatan

### **BAB IV PENUTUP**

Meliputi hal – hal yang perlu ditambahkan sebagai kesimpulan atas dokumen perencanaan Renja PD yang telah disusun.



## **BAB II**

### **EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

#### **2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.**

Hasil evaluasi pelaksanaan Renja perangkat daerah tahun lalu (tahun 2017) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun 2018) akan disajikan pada bab ini sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 meliputi 1 periode (5 tahun) Renstra perangkat daerah.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu, dan realisasi Renstra SKPD mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan SKPD dan/atau realisasi APBD untuk SKPD yang bersangkutan.

Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra SKPD; dan
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

#### **2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008. Jenis Indikator yang dikaji disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing perangkat daerah.



Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD

Provinsi Kalimantan Utara

NO	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra SKPD			Realisasi Capaian		Proyeksi			Catatan Analisis
				Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Jumlah Raperda yang disahkan menjadi Perda			2	5	5	0	5	2	5	5	Perda
2	Persentase unit kerja yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran			64%	80%	85%	48%	85%	64%	80%	85%	Personil
3	Cakupan unit kerja yang mendapatkan layanan sarana dan prasarana aparatur			85%	85%	85%	55%	85%	85%	85%	85%	Kendaraan, rumah jabatan, sarana dan prasarana tersedia
4	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya			65%	75%	75%	50%	70%	65%	75%	75%	Kegiatan
5	Cakupan Fasilitas Penganggaran,			0%	0%	80%	50%	70%	65%	75%	80%	Kegiatan





### **2.3. Isu –isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Utara**

Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Sekretariat DPRD dan berdasarkan telaahan visi dan misi kepala daerah maka isu strategis Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Utara antara lain :

1. Meningkatkan kompetensi Sumber Daya Aparatur Sekretariat DPRD untuk mewujudkan Sekretariat DPRD sebagai institusi yang kapabel di bidangnya;
2. Mengoptimalkan ketersediaan sarana dan prasarana serta pengembangan kelembagaan Sekretariat DPRD untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD sebagai lembaga perwakilan.

### **2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD**

Bagian ini menyajikan perbandingan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan dalam Renja Perangkat Daerah sesuai dengan Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2018. Persandingan ini disajikan pada tabel berikut:



Tabel 2.4

Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2018

Provinsi Kalimantan Utara

Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Utara

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	Kalimantan Utara	Jumlah Raperda yang disahkan menjadi Perda	5	45.705.312.500	1Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	Kalimantan Utara	Jumlah Raperda yang disahkan menjadi Perda	5	34.772.174.354,80	
	a. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah		Jumlah Rancangan Peraturan Daerah yang dibahas	5	4.605.000.000	a. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah		Jumlah Rancangan Peraturan Daerah yang dibahas	5	3.471.000.000	
	b. Hearing / Dialog dan Koordinasi dengan Pejabat		Jumlah Hearing / Dialog dan Koordinasi dengan Pejabat	-	0	b. Hearing / Dialog dan Koordinasi dengan Pejabat		Jumlah Hearing / Dialog dan Koordinasi dengan	1	599.600.000	



**Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Utara**

	Pemda dan Tokoh Agama		Pemda dan Tokoh Agama			Pemda dan Tokoh Agama		Pejabat Pemda dan Tokoh Agama			
	c. Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan		Jumlah Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan	-	0	c. Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan		Jumlah Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan	14	1.906.000.000	
	d. Rapat rapat paripurna		Jumlah Rapat rapat paripurna	12	2.229.000.000	d. Rapat rapat paripurna		Jumlah Rapat rapat paripurna	12	2.191.000.000	
	e. Kegiatan Reses		Jumlah Kegiatan Reses	3	10.925.000.000	e. Kegiatan Reses		Jumlah Kegiatan Reses	3	6.310.500.000	
	f. Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah		Jumlah Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah	2	4.500.000.000	f. Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah		Jumlah Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah	2	3.700.000.000	
	g. Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD		Jumlah kegiatan peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD	3	5.993.562.500	g. Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD		Jumlah kegiatan peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD	3	1.267.500.000	
	h. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Sosialisasi peraturan perundang undangan	6	1.160.000.000	h. Hearing / Dialog Pembahasan Raperda		Jumlah Hearing / Dialog Pembahasan Raperda	6	1.263.000.000	
	i. Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan		Jumlah Frekuensi Pemeliharaan Kesehatan	1	280.000.000	i. Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan		Jumlah Frekuensi Pemeliharaan Kesehatan Pimpinan dan Anggota DPRD	1	280.000.000	



**Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Utara**

	Pimpinan dan Anggota DPRD		Pimpinan dan Anggota DPRD			Pimpinan dan Anggota DPRD					
	j. Penyebarluasan Informasi Kegiatan DPRD		Jumlah Kegiatan DPRD yang dipublikasikan di media massa dan elektronik	85	4.850.000.000	j. Penyebarluasan Informasi Kegiatan DPRD		Jumlah Kegiatan DPRD yang dipublikasikan di media massa dan elektronik	85	5.040.200.000	
	k. Rapat rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Anggota DPRD		Jumlah Rapat rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Anggota DPRD	11	3.602.264.364	k. Rapat rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Anggota DPRD		Jumlah Rapat rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Anggota DPRD	11	3.602.264.364	
	l. Rapat rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah Anggota DPRD		Jumlah Rapat rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah Anggota DPRD	7	6.507.750.000	l. Rapat rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah Anggota DPRD		Jumlah Rapat rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah Anggota DPRD	7	1.504.029.990,80	
	m. Pembahasan LKPJ Kepala Daerah		Jumlah LKPJ Kepala Daerah yang dibahas	1	430.000.000	m. Pembahasan LKPJ Kepala Daerah		Jumlah LKPJ Kepala Daerah yang dibahas	1	637.080.000	
	n. Kunjungan Kerja Keluar Daerah		Jumlah Kunjungan Kerja Keluar Daerah	4	4.225.000.000	n. Kunjungan Kerja Keluar Daerah		Jumlah Kunjungan Kerja Keluar Daerah	4	1.500.000.000	
	o. Kunjungan Kerja Luar Negeri		Jumlah Kunjungan Kerja Luar Negeri	-	0	o. Kunjungan Kerja Luar Negeri		Jumlah Kunjungan Kerja Luar Negeri	1	1.500.000.000	
<b>2</b>	<b>Program Pelayanan</b>	<b>Kalimantan Utara</b>	<b>Persentase unit kerja yang memperoleh pelayanan</b>	<b>85</b>	<b>10.987.143.213</b>	<b>Program Pelayanan</b>	<b>Kalimantan Utara</b>	<b>Persentase unit kerja yang memperoleh pelayanan</b>	<b>85</b>	<b>9.937.264.000</b>	



**Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Utara**

<b>Administrasi Perkantoran :</b>		<b>administrasi perkantoran</b>				<b>Administrasi Perkantoran :</b>		<b>administrasi perkantoran</b>			
a. Penyediaan jasa surat menyurat		Jumlah surat yang dikirim	70	15.000.000		a. Penyediaan jasa surat menyurat		Jumlah surat yang dikirim	70	22.000.000	
b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		Jumlah penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12	318.000.000		b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		Jumlah penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12	318.000.000	
c. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional		Jumlah kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	30	268.900.000		c. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional		Jumlah kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	30	230.000.000	
d. Penyediaan jasa administrasi keuangan		Jumlah penyediaan administrasi jasa keuangan	12	4.061.143.213		d. Penyediaan jasa administrasi keuangan		Jumlah penyediaan administrasi jasa keuangan	12	5.795.264.000	
e. Penyediaan jasa kebersihan kantor		Jumlah penyediaan jasa kebersihan kantor	12	396.000.000		e. Penyediaan jasa kebersihan kantor		Jumlah penyediaan jasa kebersihan kantor	12	500.000.000	
f. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja		Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	5	350.000.000		f. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja		Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	5	200.000.000	
g. Penyediaan alat tulis kantor		Jumlah penyediaan alat	12	200.000.000		g. Penyediaan alat tulis kantor		Jumlah penyediaan alat	12	150.000.000	



Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Utara

			tulis kantor yang disediakan					tulis kantor yang disediakan			
	h. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan		Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12	280.250.000	h. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan		Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12	150.000.000	
	i. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor		Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	14	100.000.000	i. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor		Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	14	50.000.000	
	j. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Diadakan	-	0	j. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Diadakan	60	672.000.000	
	k. Penyediaan peralatan rumah tangga		Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	-	0	k. Penyediaan peralatan rumah tangga		Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	40	90.000.000	
	l. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan		Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	25	1.309.500.000	l. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan		Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	25	600.000.000	
	m. Penyediaan makanan dan minuman		Jumlah makanan dan minuman yang disediakan	3.000	2.438.350.000	m. Penyediaan makanan dan minuman		Jumlah makanan dan minuman yang disediakan	3.000	510.000.000	



**Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Utara**

	n. Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah		Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	12	750.000.000	n. Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah		Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	12	400.000.000	
	o. Rapat Rapat Koordinasi, Pembinaan, dan Pengawasan Di Dalam Daerah		Jumlah Rapat Rapat Koordinasi, Pembinaan, dan Pengawasan Di Dalam Daerah	9	500.000.000	o. Rapat Rapat Koordinasi, Pembinaan, dan Pengawasan Di Dalam Daerah		Jumlah Rapat Rapat Koordinasi, Pembinaan, dan Pengawasan Di Dalam Daerah	9	250.000.000	
<b>3</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Kalimantan Utara</b>	<b>Cakupan unit kerja yang mendapatkan layanan sarana dan prasarana aparatur</b>	<b>85</b>	<b>3.845.600.000</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Kalimantan Utara</b>	<b>Cakupan unit kerja yang mendapatkan layanan sarana dan prasarana aparatur</b>	<b>85</b>	<b>1.430.000.000</b>	
	a. Pengadaan perlengkapan Gedung Kantor		Jumlah perlengkapan kantor yang diadakan	5	364.600.000	a. Pengadaan perlengkapan Gedung Kantor		Jumlah perlengkapan kantor yang diadakan	-	0	
	b. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor		Jumlah peralatan gedung kantor	5	691.000.000	b. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor		Jumlah peralatan gedung kantor	-	0	
	c. Penyewaan Rumah / Gedung / Gudang / Parkiran Kantor Dinas		Jumlah rumah/gedung/gudang/ parkiran kantor dinas yang disewa	2	150.000.000	a. Penyewaan Rumah / Gedung / Gudang / Parkiran Kantor Dinas		Jumlah rumah/gedung/gudang/ parkiran kantor dinas yang disewa	2	250.000.000	
	d. Pengadaan pakaian dinas		Jumlah pakaian dinas beserta	-	0	b. Pengadaan pakaian dinas		Jumlah pakaian dinas beserta	35	140.000.000	



**Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Utara**

	beserta perengkapannya		perengkapannya yang diadakan			beserta perengkapannya		perengkapannya yang diadakan		
	e. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor		Jumlah gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala	2	195.000.000	c. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor		Jumlah gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala	2	160.000.000
	f. Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabatan		Jumlah mobil jabatan yang siap beroperasi	30	2.105.000.000	f. Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabatan		Jumlah mobil jabatan yang siap beroperasi	-	0
	g. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional		Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara rutin/berkala	-	0	d. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional		Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara rutin/berkala	30	630.000.000
	h. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor		Jumlah pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	12	340.000.000	e. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor		Jumlah pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	12	250.000.000
<b>5</b>	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>Kalimantan Utara</b>	<b>Persentase Pegawai yang disiplin dalam berpakaian dinas</b>	<b>75</b>	<b>654.500.000</b>	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>Kalimantan Utara</b>	<b>Persentase Pegawai yang disiplin dalam berpakaian dinas</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
	a. Pengadaan Pakaian Dinas dan Perengkapannya		Jumlah pakaian dinas beserta perengkapannya	40	654.500.000	a. Pengadaan Pakaian Dinas dan Perengkapannya		Jumlah pakaian dinas beserta perengkapannya	-	0
<b>6</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas</b>	<b>Kalimantan Utara</b>	<b>Persentase sumber daya aparatur yang</b>	<b>75</b>	<b>200.000.000</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas</b>	<b>Kalimantan Utara</b>	<b>Persentase sumber daya aparatur yang</b>	<b>75</b>	<b>200.000.000</b>



**Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Utara**

	Sumber Daya Aparatur		memiliki kompetensi sesuai bidangnya			Sumber Daya Aparatur		memiliki kompetensi sesuai bidangnya			
	a. Pendidikan dan pelatihan formal		Jumlah peserta yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	30	300.000.000	a. Pendidikan dan pelatihan formal		Jumlah peserta yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	30	200.000.000	
<b>7</b>	<b>Program Penganggaran, Pengawasan / Monev dan Kode Etik</b>	<b>Kalimantan Utara</b>	<b>Cakupan Fasilitas Penganggaran, Pengawasan / Monev &amp; Kode Etik</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>Program Penganggaran, Pengawasan / Monev dan Kode Etik</b>	<b>Kalimantan Utara</b>	<b>Cakupan Fasilitas Penganggaran, Pengawasan / Monev &amp; Kode Etik</b>	<b>80</b>	<b>3.151.710.000</b>	
	a. Penyusunan Pokok-pokok Pikiran DPRD		Jumlah Laporan Pokok-pokok Pikiran DPRD	-	0	a. Penyusunan Pokok-pokok Pikiran DPRD		Jumlah Laporan Pokok-pokok Pikiran DPRD	3	264.750.000	
	b. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban APBD		Jumlah Fasilitas Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban APBD	-	0	b. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban APBD		Jumlah Fasilitas Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban APBD	1	679.360.000	
	c. Pembahasan Perda APBD, KUA-PPAS, dan Perda APBD-P, KUPA-PPAS-P		Jumlah Kegiatan Pembahasan Perda APBD, KUA-PPAS, dan Perda APBD-P, KUPA-PPAS-P	-	0	c. Pembahasan Perda APBD, KUA-PPAS, dan Perda APBD-P, KUPA-PPAS-P		Jumlah Kegiatan Pembahasan Perda APBD, KUA-PPAS, dan Perda APBD-P, KUPA-PPAS-P	4	1.532.400.000	



**Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Utara**

---

	d. Penyusunan Peraturan Kode Etik dan SOP		Jumlah Laporan hasil Penyusunan Peraturan Kode Etik dan SOP	-	0	d. Penyusunan Peraturan Kode Etik dan SOP	Jumlah Laporan hasil Penyusunan Peraturan Kode Etik dan SOP	1	675.200.000	
--	---	--	---	---	---	---	---	---	-------------	--



## **2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan Provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari perangkat daerah Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi perangkat daerah Provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota.



### BAB III

## TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

#### 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Utara.

#### 3.2. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SKPD.

Tabel 3.2

Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja Utama dan Target Tahun 2018

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Pelayanan Terhadap Fungsi DPRD Provinsi Kalimantan Utara	Meningkatkan Tata Kelola Penyelenggaraan Pelayanan Terhadap Fungsi DPRD Provinsi Kalimantan Utara	Persentase Kegiatan DPRD Yang Difasilitasi Oleh Sekretariat DPRD	100%

#### 3.3. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan perangkat daerah guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan, diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapi, menjawab tantangan pembangunan, serta memaksimalkan peluang yang ada.



***Secretariat DPRD Provinsi Kalimantan Utara*** 

---

Program dan kegiatan Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Utara yang direncanakan untuk periode tahun 2018 beserta prakiraan maju tahun 2019 disajikan pada tabel berikut ini :



Tabel 3.3

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2018

dan Prakiraan Maju Tahun 2019

Provinsi Kalimantan Utara

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4 01 04 15	<b>Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah</b>	<b>Jumlah Raperda yang disahkan menjadi Perda</b>	<b>Kalimantan Utara</b>	5	<b>34.772.174.354,80</b>	<b>APBD</b>	Tahun 2018 dan tahun 2019 merujuk pada renstra 2016-2021	5	<b>43.183.441.713</b>
01 04 15 01	a. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah yang dibahas		5	3.471.000.000			5	3.431.000.000
01 04 15 02	b. Hearing / Dialog dan Koordinasi dengan Pejabat Pemda dan Tokoh Agama	Jumlah Hearing / Dialog dan Koordinasi dengan Pejabat Pemda dan Tokoh Agama		1	599.600.000			1	1.063.600.000
01 04 15 03	c. Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan	Jumlah Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan		14	1.906.000.000			18	2.836.136.000



**Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Utara**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
01 04 15 04	d. Rapat rapat paripurna	Jumlah Rapat rapat paripurna		12	2.191.000.000			7	1.760.000.000
01 04 15 05	e. Kegiatan Reses	Jumlah Kegiatan Reses		3	6.310.500.000			3	8.425.100.000
01 04 15 06	f. Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah	Jumlah Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah		2	3.700.000.000			3	1.000.000.000
01 04 15 07	g. Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD	Jumlah kegiatan peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD		3	1.267.500.000			3	1.350.000.000
01 04 15 08	h. Hearing / Dialog Pembahasan Raperda	Jumlah Sosialisasi peraturan perundang undangan		6	1.263.000.000			6	1.373.000.000
01 04 15 10	i. Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Pimpinan dan Anggota DPRD	Jumlah Frekuensi Pemeliharaan Kesehatan Pimpinan dan Anggota DPRD		1	280.000.000			1	280.000.000
01 04 15 11	j. Penyebarluasan Informasi Kegiatan DPRD	Jumlah Kegiatan DPRD yang dipublikasikan di		85	5.040.200.000			85	4.950.000.000



**Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Utara**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		media massa dan elektronik							
01 04 15 12	k. Rapat rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Anggota DPRD	Jumlah Rapat rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Anggota DPRD		11	3.602.264.364			12	7.755.605.713
01 04 15 13	l. Rapat rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah Anggota DPRD	Jumlah Rapat rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah Anggota DPRD		7	1.504.029.990,80			1	1.072.000.000
01 04 15 15	m. Pembahasan LKPJ Kepala Daerah	Jumlah LKPJ Kepala Daerah yang dibahas		1	637.080.000			4	3.000.000.000
01 04 15 18	n. Kunjungan Kerja Keluar Daerah	Jumlah Kunjungan Kerja Keluar Daerah		4	1.500.000.000			6	2.387.000.000
01 04 15 19	o. Kunjungan Kerja Luar Negeri	Jumlah Kunjungan Kerja Keluar Negeri		1	1.500.000.000			1	2.500.000.000
1 20 04 01	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran :</b>	<b>Persentase unit kerja yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran</b>	<b>Kalimantan Utara</b>	<b>85</b>	<b>9.937.264.000</b>	<b>APBD</b>	Tahun 2018 dan tahun 2019 merujuk pada renstra 2016-2021	<b>90</b>	<b>11.705.024.742</b>



**Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Utara**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		a. Penyediaan jasa surat menyurat		70	22.000.000			70	20.000.000
20	04	01	02	b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik			12	318.000.000
20	04	01	06	c. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan			30	250.000.000
20	04	01	07	d. Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah penyediaan administrasi jasa keuangan			12	5.795.264.000
20	04	01	08	e. Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah penyediaan jasa kebersihan kantor			12	400.000.000
20	04	01	09	f. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki			5	200.000.000
20	04	01	10	g. Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah penyediaan alat tulis kantor yang disediakan			12	150.000.000



**Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Utara**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
20 04 01 11	h. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan		12	150.000.000			12	150.000.000
20 04 01 12	i. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan		14	50.000.000			14	50.000.000
20 04 01 13	j. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Diadakan		60	672.000.000			14	50.000.000
20 04 01 14	k. Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan		40	90.000.000			40	90.000.000
20 04 01 15	l. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan		25	600.000.000			25	600.000.000
20 04 01 17	m. Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan		3.000	510.000.000			3.000	500.000.000



**Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Utara**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
20 04 01 18	n. Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah		12	400.000.000			3	1.944.160.742
20 04 01 19	o. Rapat Rapat Koordinasi, Pembinaan, dan Pengawasan Di Dalam Daerah	Jumlah Rapat Rapat Koordinasi, Pembinaan, dan Pengawasan Di Dalam Daerah		9	250.000.000			1	600.000.000
1 20 04 02	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Cakupan unit kerja yang mendapatkan layanan sarana dan prasarana aparatur</b>	<b>Kalimantan Utara</b>	<b>85</b>	<b>1.430.000.000</b>	<b>APBD</b>	Tahun 2018 dan tahun 2019 merujuk pada renstra 2016-2021	<b>90</b>	<b>2.200.000.000</b>
20 04 02 11	a. Penyewaan Rumah / Gedung / Gudang Parkiran Kantor Dinas	Jumlah rumah/gedung/gudang/parkiran kantor dinas yang disewa		2	250.000.000			2	500.000.000
1 20 04 03	b. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan		35	140.000.000			35	200.000.000



**Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Utara**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
20 04 02 22	c. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala		2	160.000.000			2	200.000.000
20 04 02 24	d. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara rutin/berkala		30	630.000.000			30	1.000.000.000
20 04 02 26	e. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor		12	250.000.000			12	300.000.000
20 04 03 02	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya</b>	<b>Kalimantan Utara</b>	<b>75</b>	<b>200.000.000</b>	<b>APBD</b>	Tahun 2018 dan tahun 2019 merujuk pada renstra 2016-2021	<b>80</b>	<b>300.000.000</b>
1 20 04 05	a. Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah peserta yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal		30	200.000.000			20	300.000.000
20 04 05 01	<b>Program Penganggaran, Pengawasan / Monev dan Kode Etik</b>	<b>Cakupan Fasilitasi Penganggaran, Pengawasan / Monev &amp; Kode Etik</b>	<b>Kalimantan Utara</b>	<b>80</b>	<b>3.151.710.000</b>	<b>APBD</b>	Tahun 2018 dan tahun 2019 merujuk pada renstra 2016-2021	<b>85</b>	<b>3.596.250.000,69</b>



**Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Utara**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	a. Penyusunan Pokok-pokok Pikiran DPRD	Jumlah Laporan Pokok-pokok Pikiran DPRD		3	264.750.000			3	524.750.000
	b. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Fasilitas Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban APBD		1	679.360.000			1	831.000.000
	c. Pembahasan Perda APBD, KUA-PPAS, dan Perda APBD-P, KUPA-PPAS-P	Jumlah Kegiatan Pembahasan Perda APBD, KUA-PPAS, dan Perda APBD-P, KUPA-PPAS-P		4	1.532.400.000			4	1.337.000.000
	d. Penyusunan Peraturan Kode Etik dan SOP	Jumlah Laporan hasil Penyusunan Peraturan Kode Etik dan SOP		1	675.200.000			1	903.500.000



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Utara tahun 2018 merupakan suatu dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Utara 2016-2021 untuk tahun 2018. Rencana Kerja memuat tujuan dan sasaran serta program dan kegiatan yang harus diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Utara. Dokumen ini merupakan rangkaian rencana kegiatan prioritas dan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai pada akhir tahun 2018.

Dengan mengintegrasikan berbagai sumberdaya lain yang dimiliki oleh Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Utara, penyusunan renja diharapkan mampu mengantisipasi sekaligus menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik di intern Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Utara maupaun Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Utara di lingkup daerah.

Akhirnya dengan tersusunnya Renja Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018 semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak dan mampu mendorong pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan di dalam dokumen RKPD yang akan sekaligus mencapai visi dan misi kepala daerah periode 2016-2021." Berpadu dalam kemajemukan untuk mewujudkan Kaltara 2020 yang mandiri, aman, dan damai dengan disukung pemerintahan yang bersih dan berwibawa."

**Tanjung Selor, 1 Desember 2017**

**Sekretaris DPRD**

**Drs. Purnomo, MM**  
**Pembina Tk. I/ IV b**  
**NIP. 19590810 198701 1 002**